

Penataan Kota dan Warisan Budaya

Penetapan bangunan warisan budaya di Yogyakarta yang rentan masalah menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah saat ini. Salah satunya soal penetapan bangunan warisan budaya yang memberi peluang masyarakat mengajukan penghapusan status warisan budaya atas bangunan yang dimilikinya. Di sisi tertentu aturan ini bermaksud untuk membenahi kekacauan mengenai penetapan bangunan warisan budaya sejak tahun 2009. Penetapan dan penghapusan status warisan budaya berfungsi sebagai verifikasi ulang. Akan tetapi aturan ini juga memberi celah yang mengancam pelestarian bangunan warisan budaya.

Sebagai salah satu identitas kota, maka keberadaan bangunan warisan budaya perlu mendapat perhatian dan upaya pelestarian. Selain masalah regulasi yang kini tengah mengemuka, upaya penataan kota juga perlu memiliki pijakan. Bukan berarti mematikan kreatifitas, namun pengembangan kota harus memperhatikan aspek pelestarian. Apalagi Yogyakarta memiliki banyak bangunan warisan budaya yang sarat sejarah. Salah satunya kawasan Malioboro yang

kaya akan arsitektur bangunan sebagai identitas keistimewaan. Mulai tradisional Jawa, kolonial Belanda, Indis, hingga Tionghoa.

Perhatian pemerintah daerah terhadap potensi budaya fisik di Yogyakarta telah diwujudkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Arsitektur Bangunan Berciri Khas Yogyakarta yang telah disahkan beberapa waktu lalu. Regulasi ini dikeluarkan untuk menjaga eksistensi bangunan yang termasuk dalam Kawasan Cagar Budaya (KCB) dan Kawasan Warisan Budaya (KWB) agar jangan sampai punah akibat eksploitasi bisnis. Pemerintah tentu tak ingin kecolongan lagi seperti kasus Pajeksan yang terjadi beberapa tahun lalu.

Sejarah kota Pandangan dominan di kalangan sejarawan dalam menginterpretasi perkembangan kota Yogyakarta tentu tidak lepas dari konteks keraton. Sebagai bekas keraton tentu saja berdirinya keraton menjadi titik awal perkembangan kota. Imajinasi historis yang tercipta, kota Yogyakarta

bertolak dari keraton sebagai pusat pertumbuhan. Sementara aspek komunitas lainnya hanya dianggap sebagai komplemen struktur kota. Padahal dalam konteks yang lebih luas, pengaruh kolonial Belanda, budaya Indis, dan Tionghoa harus diakui turut berperan dalam sejarah perkembangan kota Yogyakarta.

Tak hanya keraton dan kawasan Malioboro, sudah lama juga Titik Nol Kilometer dan seputaran Tugu Pal Putih menjadi spot wisata kota yang menjual. Wajah kota Yogyakarta ini terbentuk dari perpaduan berbagai pengaruh budaya. Arsitektur khas kolonial Belanda begitu kentara di kawasan Titik Nol Kilometer dan Malioboro. Deretan rumah di kawasan Tugu dan Kotabaru lekat dengan arsitektur bergaya Indis. Sementara arsitektur khas Tionghoa banyak ditemukan di Ketandan, Kranggan, dan Pakuningratan.

Situasi ini melayangkan memori historis bahwa sejak dulu peran berbagai komunitas masyarakat berkontribusi dalam membangun

kota. Kolonial Belanda membawa pengaruh modernisasi bagi perkembangan kota. Mereka membangun kantor-kantor dan perumahan bergaya modern. Pengaruh ini kemudian berakulturasi dengan budaya lokal menjelma menjadi budaya Indis yang juga banyak dianut oleh kaum neo priyayi. Kawasan Kotabaru kala itu pun menjadi pusat kota modern di Yogyakarta.

Identitas keistimewaan Bercermin dari sejarah perkembangan kota dan dinamika masyarakatnya, maka tak hanya pemerintah, masyarakat pun memiliki tanggung jawab melu handarbeni lan hang-rungkebi atas warisan bersama ini. Aturan mengenai penghapusan status bangunan warisan budaya tentu menjadi kontraproduktif dengan tanggung jawab sosial masyarakat. Ditambah kemajuan zaman juga mengancam karena kota cenderung berkembang dengan pola pembangunannya yang brutal dan meninggalkan nilai kelokalan.

Hendra Kurniawan, M.Pd.,
Dosen Pendidikan Sejarah
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta